

Pendampingan BUMDesa : Peran Strategis Bumdes Dan Revitalisasi Ekonomi Desa Di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo

Ismawati Septiningsih¹, Itok Dwi Kurniawan²
Universitas Sebelas Maret, Surakarta¹
Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Abstract — BUMDes as a village-managed business institution has a strategic role in efforts to improve the village economy. However, unfortunately, there are still very few villages that are able to optimize the role of BUMDes, so that many BUMDes are "in suspended animation" and are not developing. For this reason, revitalization measures are needed for existing BUMDes. For example, in several BUMDes in the Karanganyar, Klaten and Sukoharjo areas. This is important because the BUMDes revitalization process ultimately seeks to make the village a competitive village. The location of the activity was held at the LPPM Building, Sebelas Maret University. The methods that will be used in this activity are through lectures, discussions, focus group discussions, and mentoring. The results of this activity show that understanding regarding the strategic role of BUMDes and the revitalization of the village economy has increased. Apart from that, BUMDes administrators in the Karanganyar, Klaten and Sukoharjo areas can be more enthusiastic and optimistic in carrying out BUMDes activities.

Keywords: BUMDes, Strategic Role, Revitalization

Abstrak— BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola desa memiliki peran strategis dalam usaha peningkatan perekonomian desa. Namun sayang, masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang "mati suri" dan tak berkembang. Untuk itu diperlukan tindakan revitalisasi kepada BUMDes-BUMDes yang sudah ada. Contohnya, di beberapa BUMDes yang berada dikawasan Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo. Hal ini penting karena proses revitalisasi BUMDes ini pada akhirnya berupaya menciptakan desa tersebut menjadi desa yang berdaya saing. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Gedung LPPM Universitas Sebelas Maret. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, focus group discussion, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman dalam terkait peran strategis BUMDes dan revitalisasi ekonomi desa telah meningkat. Selain itu, pengurus BUMDes di kawasan Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo dapat lebih semangat dan optimis dalam menjalankan kegiatan BUMDes.

Kata Kunci : BUMDes, Peran Strategis, Revitalisasi

I. PENDAHULUAN

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa. Secara sederhana untuk memahami BUMDes, jika di pusat terdapat BUMN, maka di daerah ada BUMD, dan di desa ada BUMDes. BUMDes adalah badan usaha, dengan tujuan mencari keuntungan yang nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes sendiri merupakan amanat dari Permendes No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes yang menyatakan

bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sudah ada sejak sebelum UU Desa No 6/2014. Tetapi paska UU Desa, BUMDes menjadi semakin strategis. Pendirian BUMDes menjadi Program Prioritas Kementerian Desa di tahun 2017 [1].

Menurut Maryunani (2008) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga usaha yang berada di desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan meningkatkan kebutuhan serta potensi desa. Artinya BUMDes merupakan lembaga usaha dan memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha guna memperoleh hasil berupa laba. Artinya BUMDes merupakan lembaga usaha dan memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha guna memperoleh hasil berupa laba. Selain itu, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang di dalam aktivitasnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan berpartisipasi juga dalam produksi pelayanan sosial. Pada saat yang sama, sebagai entitas komersial, ia bertujuan untuk memperoleh laba dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar. Tujuan pendirian BUMDes juga adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, serta memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat [2].

Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disingkat BUMDes. BUMDes adalah suatu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Potensi desa dalam hal ini menjadi tolok ukur untuk membuat usaha desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat [3]. Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa:

"untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution)

dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar [4]. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang semakin komprehensif mengatur tentang BUMDes, perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia pun tergolong sangat pesat. Pada akhir tahun 2014 jumlah BUMDes di Indonesia terdapat 1.022 unit dan melonjak pada awal tahun 2017 menjadi 18.446 unit [5]. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang akandisejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) [6].

Pada dari hasil penelitian oleh Sumaryadi dan Saputra (2017) ditemukan bahwa faktor utama yang menghambat upaya BUMDes dalam mencapai tujuan adalah rendahnya kualitas SDM aparatur [7]. Penelitian oleh Afifa R. F. (2018) tentang Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro) menunjukkan pengelolaan dari BUMD tidak dimaksimalkan, sehingga gagal memberikan perbaikan yang signifikan. Elemen yang belum dimaksimalkan antara lain pangsa pasar, modal dan karyawan (tenaga kerja) [8].

Disamping itu masih banyak permasalahan lain yang menghambat berkembangnya suatu BUMDes. Masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang tak berkembang. diperlukan tindakan revitalisasi kepada BUMDes-BUMDes yang sudah ada. Contohnya, di beberapa BUMDes yang berada dikawasan Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo. Hal ini penting karena proses revitalisasi BUMDes ini pada akhirnya berupaya menciptakan desa tersebut menjadi desa yang berdaya saing [7].

Kajian terkait BUMDes lainnya, antara lain Nana M (2019) yaitu "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan" menjelaskan implementasi meningkat dengan adanya pelatihan. BUMDes Desa Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dimiliki oleh kurang lebih 28,37% peserta pelatihan. termasuk optimalisasi potensi desa. BUMDes yang sudah maju dan bertumbuh tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan tata kelola administratif, tetapi kemampuan mengelola bisnis, sebab keuntungan dari bisnis BUMDes sudah pasti merupakan peluang bagi kenaikan nilai PAD dan bersumber untuk desa dan dapat mendukung kesejahteraan ekonomi [9]. Dari penelitian tersebut terlihat besarnya suatu dampak dari adanya pelatihan dan pendampingan pada suatu BUMDes.

II. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari partisipan yaitu dalam hal ini adalah beberapa BUMDes di kawasan Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo yang diajak wawancara, diobservasi, dan diminta memberikan data untuk penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti mendeskripsikan proses untuk mendesain model revitalisasi dan peran strategis BUMDes [10].

III. HASIL DAN PEMBAHAAN

A. Materi Peran Strategis BUMDes & Revitalisasi Ekonomi Desa

1. Permasalahan Perekonomian Pedesaan

Kenyataan menunjukkan bahwa di desa-desa masih terdapat banyak terdapat bahan-bahan mentah, peluang usaha, dan tenaga kerja. Tersedianya bahan bahan, peluang, tenaga kerja serta tersedianya sarana perhubungan, komunikasi, dan perlistrikan akan sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi pedesaan. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di daerah pedesaan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan di kota. Terdapat beberapa permasalahan terjadinya situasi tersebut, antara lain:

- Persoalan struktural di sektor pertanian (hulu)
- Terbatasnya sarana produksi dan pengolahan pasca panen
- Terbatasnya jaringan bisnis atau konektivitas
- Posisi tawar petani lemah
- Lemahnya inklusi keuangan
- Rendahnya kualitas SDM di pedesaan
- Ekonomi biaya tinggi

Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan perlu adanya upaya untuk mengembangkan ekonomi pedesaan. Upaya pengembangan tersebut dimaksudkan untuk mengubah ekonomi pedesaan dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern, dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang tangguh, dari kedudukan ekonomi yang bergantung menjadi ekonomi yang mandiri.

2. Strategi Pemulihan Ekonomi dan Penggunaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Tujuan dilaksanakannya Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi penanggulangan kemiskinan; pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata; serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa; pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan, pencegahan *stunting* untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, serta pengembangan Desa Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Beberapa strategi pemulihan ekonomi dan penggunaan dana desa yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- b. Ketahanan Pangan Masyarakat Desa
- c. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- d. Digitalisasi Ekonomi Desa dengan Menggandeng e-commerce Global

Adapun peran BUMDes terhadap meningkatkan perekonomian masyarakat, menurut Seyadi yaitu pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat, serta mengurangi pengangguran [11].

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat ditunjukkan pada penentuan prioritas penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat membantu Masyarakat. Pemulihan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari desa yang merupakan tatanan masyarakat terkecil. Peran Desa/Kelurahan menjadi sangat penting sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengelola dana desa secara efektif, efisien, *prudent*, transparan, dan akuntabel sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Komponen Revitalisasi Untuk Peningkatan Peranan BUMDes di Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo

Beberapa Bumdes yang hadir dalam kegiatan pendampingan BUMDes, antara lain adalah :

- a. BUMDes Jabung Makmur
- b. BUMDes Jarus Emas
- c. BUMDes Sari Makmur
- d. BUMDes Tirta Nusantara
- e. BUMDes Ngadeg Jejeg
- f. BUMDes Bina Sejahtera
- g. BUMDes Sinergi
- h. BUMDes Berdikari
- i. BUMDes Ngudi Makmur
- j. BUMDes Jaya Janti
- k. BUMDes Jadi Jaya
- l. BUMDes Sekar Mandiri
- m. BUMDes Sutowijoyo
- n. BUMDes Lumintu
- o. BUMDes Gemah Ripah Sugihan
- p. BUMDes Mandiri Bugel
- q. BUMDes Anugrah Palur Sejahtera
- r. BUMDes Lumbung Mukti Parangjoro
- s. BUMDes Berkah Duwet
- t. BUMDes Mata Bangsa Transgan
- u. Dst.

Masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang tak berkembang. diperlukan tindakan revitalisasi kepada BUMDes-BUMDes yang sudah ada. Komponen revitalisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain adalah:

- a. Pendampingan, rekayasa kelembagaan BUM Desa sebisa mungkin berangkat dari inisiasi masyarakat, tugas pemerintah adalah menjadi pemacu dan memberikan pendampingan untuk pengembangan BUM Desa. Pendampingan

harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan BUM Desa.

- b. Dukungan Permodalan, penambahan modal usaha bagi BUM Desa. Besaran penambahan akan berbeda tergantung masalah BUM Desa tersebut.
- c. Peningkatan Jaringan, pengembangan super holding bagi BUM Desa untuk meningkatkan kapasitas. Holding BUM Desa atau BUM Desa bersama akan menggabungkan usaha BUM Desa dari sejumlah desa. Sehingga nantinya akan meningkatkan akses hingga modal BUM Desa.
- d. Penguatan SDM, penguatan SDM BUMDesa melalui pelatihan dan KKN Tematik bekerjasama dengan Perguruan Tinggi
- e. Faktor Koordinasi, kerjasama dengan korporasi menjadi bagian penting untuk regulasi kebijakan melalui strategi nasional revitalisasi BUM Desa, hal tersebut juga dapat diimplementasikan melalui kelembagaan BUM Desa yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga.

Peran BUMDesa dalam revitalisasi Ekonomi desa antara lain dengan memberikan keuntungan bagi desa tersebut, mengakomodasi produk-produk usaha individu/kelompok, menciptakan EUM & menciptakan lapangan kerja, menyediakan layanan yang belum disediakan oleh pemerintah, dan dapat memproduksi & meningkatkan nilai tambah produksi.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah antusiasme dari pihak BUMDes di Kawasan karanganyar, klaten, dan sukoharjo untuk melaksanakan kegiatan ini. Pihak BUMDes dengan antusias mengikuti dan memberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan ini.



Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Bumdesa : Peran Strategis Bumdes Dan Revitalisasi Ekonomi Desa

Pihak BUMDes merasa senang dengan adanya kegiatan ini karena dapat menambah wawasan untuk pengurus maupun direktur dari tiap-tiap BUMDes yang mengikuti kegiatan ini. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah fasilitas ruangan di LPPM Universitas Sebelas Maret yang tidak mendukung untuk melakukan pemutaran video oleh pembicara, yang mana audio dari video tersebut tidak dapat terdengar dengan jelas.

C. Hasil yang Dicapai dan Tindak Lanjut



Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Bumdesa : Peran Strategis Bumdes Dan Revitalisasi Ekonomi Desa

Adapun hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini yaitu perwakilan yang hadir dalam kegiatan Pendampingan BUMDes ini yang terdiri dari pengurus atau direktur BUMDes di kabupaten karanganyar, klaten, dan sragen mendapatkan pengetahuan terkait Peran strategis BUMDes & revitalisasi ekonomi desa. Selain itu diharapkan baik Direktur dan pengurus masing-masing BUMDes dapat lebih semangat dan antusias dalam mengembangkan program-program BUMDes sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Untuk tindak lanjut dari pendampingan BUMDes ini akan dilakukan kedepannya dengan melibatkan mahasiswa terjun secara langsung ke lokasi BUMDes melalui program KKN yang ada di Universitas Sebelas Maret.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan BUMDes, peran Strategis BUMDes & Revitalisasi Ekonomi Desa di wilayah Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo yang telah dilaksanakan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Pendampingan dilakukan pada LPPM UNS berjalan lancar dan kondusif. Respon delegasi BUMDes yang hadir terhadap kegiatan pendampingan dirasa cukup baik. Hal itu tercermin dengan delegasi yang hadir dan antusias, Dari hasil pemaparan oleh pembicara terkait kegiatan peran Strategis BUMDes & Revitalisasi Ekonomi Desa di wilayah Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo, delegasi dari setiap BUMDes baik itu direktur maupun pengurus dapat lebih memahami peran Strategis BUMDes dan dapat lebih antusias dan semangat dalam menjalankan kegiatan di BUMDes sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes, peran Strategis BUMDes & Revitalisasi Ekonomi Desa di wilayah Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo dilakukan pengembangan potensi desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa tersebut dan kegiatan ini telah berjalan dengan lancar. Penyusunan karya ini dapat kami selesaikan dengan baik tidak lepas dari bantuan dan dukungan Universitas Sebelas Maret, Kementrian Keungan, dan semua pihak yang bekerja sama dalam menyelesaikan pendampingan ini. Penulis memiliki harapan

dengan adanya karya tulis ini mampu memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, "Program Prioritas Pemulihan Ekonmi Untuk Pendirian BUMDes," blog-Bumdes. Accessed: Nov. 12, 2023. [Online]. Available: <https://blog.bumdes.id/program-prioritas-pemulihan-ekonomi-untuk-pendirian-bumdes/>
- [2] Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- [3] Bambang, *Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*. Bengkulu: STAIN Curup Bengkulu, 2015. [Online]. Available: alexlesti@gmail.com.
- [4] E. Syahrul, "Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Raja desa Kabupaten Ciamis," *Din. J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 6, no. 4, pp. 327–338, 2019.
- [5] C. A. M, "BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Fungsinya?," Kompas.com. Accessed: Nov. 12, 2023. [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/bumdes-adalah-badan-usaha-milik-desa-apa-fungsinya?page=all>
- [6] et all Ramadana, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa," *J. Adm. Publik*, vol. 1, no. 6, pp. 1068–1076, 2013.
- [7] I nyoman Sumaryadi dan Romi Saputra, "The Role of the Village Business Agency as Creative Economic Implementation in Order of Comunity Empowerment of Villages of Cagak Road Subang District West Java Province", *International Journal of Information Technology and Business Management*, *Int. J. Inf. Technol. Bus. Manag.*, vol. 58, no. 1, pp. 8–21, 2017.
- [8] Afifa R. F, "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)," *J. Inst. Pemerintah. dalam Negeri*, vol. 5, no. 1, p. 15, 2018.
- [9] D. Nana M, "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan," *J. Politek. Negeri Lampung*, p. 175, 2018.
- [10] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- [11] Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003.

PENULIS



Itoq Dwi Kurniawan, Dosen Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, dan Hukum Acara Peradilan Agama pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.



Ismawati Septiningsih, Dosen Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, dan Hukum Acara Peradilan Niaga pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.